

PERANAN STAKEHOLDER TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN MASSEPE KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Rohandi
rohandi@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi peranan stakeholder dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (tabel persentase). Tehnik pengumpulan data yakni dengan membagikan qesioner kepada responden yang berjumlah 33 orang. dan melakukan wawancara langsung kepada informan yang berjumlah 3 orang. Penelitian ini dapat dipaparkan bahwa Peranan Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 3 indikator, yaitu subsistem pengambil kebijakan, 69,75 % dengan kategori baik, Pemberi Pelayanan, 72,75% dengan kategori baik, dan penerima dampak 75,75% dengan kategori baik. Hasil rekapitulasi dari peranan stakeholder menunjukkan 72,75% dengan kategori baik. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peranan Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu tingkat urgensi 46,25% dengan kategori cukup baik, pengetahuan 69,75% dengan kategori baik, Kedekatan (komunikasi) 85,5% dengan kategori baik, dan sikap stakeholder 65 % dengan kategori baik. Hasil rekapitulasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peranan Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan menunjukkan 66,63% dengan kategori baik

Kata Kunci : Peranan dan Pembangunan

Abstract

Target of this research is to know Role of Stakeholder in the plan Development in Sub-District Of Massepe District Of Tellu Limpoe Sub-Province of Sidenreng Rappang and to know factors what influencing role of stakeholder in the plan development in Sub-District Of Massepe District Of Tellu Limpoe Sub-Province of Sidenreng Rappang. Method Research which is used in this research is research method qualitative (tables of percentage). Technics of data collecting namely by allotting qesioner to responder amounting to 33 people. and direct interview to informan amounting to 3 people. Of this research earn explain that Role of Stakeholder in the plan Development in Sub-District Of Massepe District Of Tellu Limpoe Sub-Province of Sidenreng Rappang consist of 3 indicator, that is subsistem taker of policy, 69,75 % with good category, Giver of Service, 72,75% with good category, and receiver affect 75,75% with good category. Result of summary of role of stakeholder show 72,75% with good category. In this research there are factors having an effect on to role of Stakeholder in the plan Development in Sub-District Of Massepe District Of Tellu Limpoe Sub-Province of Sidenreng Rappang that is urgency storey;level 46,25% with good enough category, knowledge 69,75% with good category, Contiguity (communication) 85,5% with good category, and attitude of stakeholder 65 % with good category . Result of factors summary having an effect on to role of Stakeholder in the plan Development show 66,63% with good category.

Keywords: Role and Development

A. PENDAHULUAN

Masa orde baru yang ditandai dengan sistem pemerintah yang lebih menekankan kepada sentralisasi, membawa bangsa ini pada suatu sistem, pemerintahan yang selalu mengutamakan negara, dimana setiap tahap proses pembangunan ditentukan oleh negara. Masyarakat hanyalah objek, pelengkap penderita, atau sekedar bagian yang ditempelkan dalam skema pembangunan. Apa yang ingin dicapai, mengapa suatu kebijakan diambil, dan bagaimana hasil pembangunan didistribusikan menjadi hal yang sangat kabur dan cenderung dimanipulasikan.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya kebijakan Otonomi Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan menurut Asas desentralisasi. Dengan demikian, pemerintah Pusat memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Paradigma Otonomi Daerah, maka penyelenggaraan proses pembangunan bertumpu pada Daerah Otonomi Kabupaten/kota sebagai daerah yang diberikan kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerah. Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pembangunan daerah di Indonesia, isu penting yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan tersebut Perencanaan Pembangunan dari Bawah (Bottom Up Planning) sistem ini dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan efektif yang nantinya di harapkan dapat mendukung usaha perencanaan pembangunan tahap berikutnya, dengan berdasarkan informasi-informasi tentang perkembangan suatu program atau proyek pembangunan disetiap jenjang pemerintahan.

Pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Melalui perencanaan yang efektif diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal dengan sumber-sumber yang terbatas adanya dan untuk menghindari pemborosan. Pada hakekatnya dalam pembangunan terdapat unsur pertumbuhan dan perubahan menuju pada keadaan yang diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya upaya berupa strategi atau kebijakan

yang tepat sehingga apa yang diinginkan pemerintah maupun masyarakat menjadi terwujud.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan lebih menitikberatkan kepada aspek perencanaan dari bawah. Dalam artian, masyarakat setempat yang melakukan perencanaan dengan tujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dari tingkatan yang paling rendah sehingga dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan, khususnya untuk mengadakan pemerataan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satu sistem perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang tersebut adalah dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten yang intinya mempunyai dua fungsi yaitu Pengelolaan keterpaduan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada tindak lanjut. Mengelola informasi pembangunan dengan cara mengolah dan menganalisa data, memantau dan menjabarkan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta pembangunan regional.

Bertolak dari kedua fungsi tersebut, maka perencanaan pembangunan pada semua tingkatan tidak jauh dari peran Stakeholder sebagai pengambil Kebijakan dalam Dunia Perencanaan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena tentunya rencana pembangunan dibuat demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Biasanya masyarakat yang berpartisipasi adalah para stakeholder. Secara sederhana stakeholder sering diartikan sebagai pihak-pihak terkait dengan suatu rencana. Stakeholder dalam hal ini juga dapat disebut sebagai pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Peranan Stakeholder Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Masepe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk mengetahui Peranan Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Masepe Kec. Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi Perencanaan Pembangunan

di Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.

(F, 2007), mengemukakan bahwa peranan ialah fungsi. Kedudukan dan bagian kedudukan. Peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama (dalam terjadinya peristiwa) misalnya tenaga-tenaga ahli dan buruhpun mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara. (Amir Santoso, 2001), mengemukakan bahwa peranan adalah seperangkat perilaku yang terorganisir, peranan adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menyalahkan (validate).

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. beberapa pendapat mengenai pengertian peranan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian peranan adalah seperangkat perilaku yang terorganisir yang harus dilakukan oleh seseorang berupa tugas, wewenang dan harapan untuk mencapai tujuan.

Stakeholder merupakan unsur terpenting suksesnya suatu kebijakan. Karena sumber utama acuan peraturan dan perencanaan yang dibuat adalah dari kebijakan pihak stakeholder. Stakeholder yang mempunyai kuasa dalam mengarahkan seperti apakah nantinya suatu kebijakan akan dibuat. Stakeholder diartikan sebagai seorang yang memegang kuasa atas kebijakan-kebijakan yang mungkin dibuat. Jadi, dapat pula diartikan sebagai titik acuan atau titik pusat terciptanya suatu kebijakan. Stakeholder adalah penentu kelangsungan kehidupan pada suatu kelompok atau organisasi terstruktur. Ketika seorang stakeholder tidak mampu membuat kebijakan secara tepat sasaran, maka habislah tatanan peraturan yang akan terjadi.

Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana. Dalam buku *Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resources Management*, Ramirez mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakeholder ini. Defenisi yang penting dikemukakan seperti Freeman (1984) yang mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh

suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan (Biset, 2007), secara singkat mendefinisikan stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan Freeman (Mardiasmo., 2002), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu, Grimble and Wellard (Widjaja, 2003), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.

Perencanaan yang matang sangat diperlukan, karena tanpa perencanaan maka tindakan yang akan dilakukan akan menghasilkan suatu yang kurang bermanfaat bahkan akan menimbulkan suatu kerugian. Dan dibawah ini ada beberapa konsep perencanaan menurut fokus masing-masing. (Kunarjo, 1996), mengatakan bahwa "perencanaan adalah suatu penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang dan diarahkan pada tujuan tertentu". Sedangkan (Tjokroamidjojo, 2006), perencanaan adalah "suatu usaha yang berkenaan dengan suatu sistem pemecahan masalah".

(Bratakusumah, 2003), mengemukakan bahwa "perencanaan adalah suatu proses untuk memutuskan tujuan-tujuan yang akan dikejar selama periode waktu yang telah ditentukan selama periode waktu dan apa yang akan dilakukan agar mencapai tujuan tersebut". Menurut (Hasibuan, 2006), perencanaan adalah "suatu proses untuk menentukan rencana, sedangkan produk dari perencanaan tersebut adalah rencana. Saul M. Katz (Tjokroamidjojo, 2006), menyatakan bahwa "perencanaan dapat dilihat dari segi satu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik merupakan alasan yang kuat untuk melakukan perencanaan".

Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu priode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Beberapa ahli memberikan pengertian perencanaan. Menurut Bintoro Tjokroaminoto, perencanaan ialah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistimatis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

(Siagian, 2003), memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan

secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)". Sedangkan (Katrasasmita, 1996), memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah sumbu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Proses pembangunan, yang pertama dilakukan adalah perencanaan. (Tjokroamidjojo, 2006), pembangunan adalah "suatu pengarah penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efisien dan efektif". Adapun unsur-unsur pokok dari perencanaan pembangunan secara umum menurut Umar Nimran (Tjokroamidjojo, 2006), adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar dari rencana pembangunan, biasa disebut tujuan, arah, sasaran dan prioritas pembangunan.
2. Kerangka perencanaan atau makro rencana. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel pembangunan dan implikasi hubungan tersebut.
3. Pemikiran sumber-sumber pembangunan adalah unsur yang penting dalam penyusunan rencana pembangunan, khususnya adalah sumber pembiayaan pembangunan yang merupakan pengkajian dari makro rencana.
4. Uraian dari kerangka kebijaksanaan yang konsisten, berbagai kebijaksanaan perlu dirumuskan kemudian dilaksanakan. Satu

sama lain kebijaksanaan pembangunan ini perlu serasi dan konsisten.

5. Program investasi, dilakukan secara sektoral dan dilakukan bersama dengan penyusunan sasaran rencana. Program ini dilakukan diberbagai bidang seperti, pertanian, industri, pendidikan, pertambangan, dan perumahan.

Administrasi pembangunan, salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan adalah pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan suatu administrasi negara yang mendukung usaha perencanaan pembangunan tersebut.

Perencanaan pembangunan lebih disebabkan adanya urgensi, pengetahuan, kedekatan, dan sikap pemangku kepentingan. Keempat variabel tersebut merupakan hasil analisis faktor konfirmatori dari model yang dianalisis sebelumnya.

1. Urgensi pemangku kepentingan adalah tingkat dimana tuntutan atau klaim dari pemangku kepentingan meminta perhatian dengan segera. Urgensi ini akan tetap ada jika tuntutan yang diajukan pemangku kepentingan merupakan sesuatu yang sensitif terhadap waktu dan bersifat kritis (Mitchell, et al., 1997). Urgensi merupakan atribut pemangku kepentingan dalam memutuskan melakukan penekanan terhadap tindakan darurat untuk menyelesaikan tuntutan pemangku kepentingan (Nguyen et al., 2009) dalam Suharto (2013).
2. Pengetahuan pemangku kepentingan berada pada kisaran penuh kepedulian hingga ketidaktahuan total. Bentuknya ditentukan oleh intensitas dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengetahuannya tentang perencanaan untuk membantu mencapai tujuan pemangku kepentingan itu sendiri. Pengetahuan itu lebih banyak berdasar atas apa yang didengarnya dan asumsinya yang sering melebihi fakta dilapangan (McElroy & Mills, 2000). Mallak et al., (1991) dalam Nguyen et al., (2009) mengobservasi bahwa saat ini tendensi pemangku kepentingan lebih tak sepenuh hati, memberitahukan sesuatu yang terjadi, vokal dan lebih mempunyai pengetahuan tentang pembangunan dari pada sebelumnya. Makin banyak pengetahuan yang dimiliki pemangku kepentingan makin banyak pula pengaruhnya terhadap pembangunan itu sendiri. (Mustikarini,

Diah. <http://planologi17.blogspot.com/2013/09/peran-stakeholder-sebagai-pengambil.html>.)

3. Kedekatan pemangku kepentingan adalah keberadaan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keterlibatan dan hubungannya dengan pembangunan (Nguyen et al., 2009). Keterlibatan ini bisa secara langsung dan tidak langsung yang keseluruhannya akan mempengaruhi proses manajemen Gibson, 2003:97).
4. Sikap pemangku kepentingan merefleksikan apa-kah pemangku kepentingan bersikap mendukung atau beroposisi terhadap pembangunan. Sikap ini merupakan tanda bagi para Stakeholder agar peduli terhadap pengaruh positif atau negatif pemangku kepentingan dalam mencapai keluaran yang ingin dicapai (Mustikarini, Diah. <http://planologi17.blogspot.com/2013/09/peran-stakeholder-sebagai-pengambil.html>.)

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu desain atau bentuk penelitian dengan memberikan gambaran tentang peranan Stakeholder terhadap perencanaan pembangunan di Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu: studi kepustakaan, Observasi, wawancara, dan kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan bantuan table frekuensi, dengan menggunakan Skala Likert sebagai alat ukur. Untuk memudahkan analisa maka pertanyaan yang diajukan kepada responden diberi gradasi sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik atau gradasi lain yang sesuai dengan pertanyaan kuesioner Sugiyono (2009:107). Dengan pemberian skor jawaban, dengan 4 skala, yaitu sangat baik skor 4, baik skor 3, cukup baik skor 2, tidak baik skor 1.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil olahan Data menunjukkan Tanggapan Responden tentang bagaimana proses pengambilan keputusan / kebijakan yang dilakukan para stakeholder kelurahan Massepe terkait dalam proses perencanaan pembangunan di kelurahan Massepe bahwa rata-rata skor yang diperoleh 2,79, dan rata-

rata persentase 69,75% yang menyatakan dengan kategori baik. Hasil olahan Data menunjukkan Tanggapan responden terhadap frekuensi pelayanan publik yang diberikan stakeholder kepada masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan di kelurahan Massepe yaitu rata-rata skor yang diperoleh 2,91 dan rata-rata persentase 72,75% dengan kategori hasil baik. Hasil olahan Data menunjukkan Tanggapan responden terhadap frekuensi tentang dampak yang diterima masyarakat terhadap para stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan di kelurahan Massepe bahwa rata-rata skor adalah 3,03 responden, rata-rata persentase adalah 75,75%. Dengan kategori cukup baik.

Hasil olahan Data menunjukkan Tanggapan responden tentang tingkat urgensi (lobi-lobi) stakeholder dalam meuntut percepatan pembangunan infrastruktur terhadap proses perencanaan Pembangunan di Kelurahan Massepe bahwa rata-rata skor adalah 1,85 dan rata-rata persentase 46,25 % dengan kategori tidak baik. Hasil olahan Data menunjukkan Tanggapan responden terhadap tingkat pengetahuan para stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan (musrenbang) di kelurahan Massepe bahwa rata-rata skor adalah 2,79 dan rata-rata persentase 69,75 % dengan kategori cukup baik.

Hasil olahan Data menunjukkan Tanggapan responden tentang komunikasi yang terjalin antara para stakeholder, pemerintah, dan masyarakat kelurahan Massepe dalam proses perencanaan pembangunan (musrenbang) di kelurahan Massepe bahwa rata-rata skor adalah 3,42 dan rata-rata persentase 85,5 % dengan kategori sangat baik. Hasil olahan Data menunjukkan Tanggapan responden tentang sikap stakeholder kelurahan Massepe dalam mendukung proses perencanaan Pembangunan di Kelurahan Massepe bahwa rata-rata skor adalah 2,6 dan rata-rata persentase 65 % dengan kategori cukup baik.

D. KESIMPULAN

Subsistem pengambil kebijakan yang ada pada Musrenbang tingkat Kelurahan Massepe pada Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya terutama pada proses pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan Indikator kedua adalah Pemberi Pelayanan, dimana berdasarkan hasil

penelitian diketahui juga sudah berjalan dengan baik, dan indikator ketiga adalah Pemberi dampak, dimana dari hasil penelitian bahwa para stakeholder memberikan dampak yang positif bagi pembangunan di kelurahan Masepe

Dari ketiga indikator tersebut diatas, juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peranan stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Masepe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Urgensi pemangku kepentingan para responden memberikan jawaban yang sangat tidak baik, Pengetahuan dimana rata-rata responden menyatakan sangat baik, kedekatan komunikasi sudah berjalan dengan sangat baik dan sikap stakeholder dalam pelaksanaan Musrenbang yang diperoleh adalah baik.

E. REFERENSI

- Amir Santoso, d. J. (2001). *Analisa kebijakan public : Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik No. 3*. Jakarta: Gramedia.
- Biset, J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bratakusumah, D. d. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- F, S. I. (2007). *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Bharata.
- Hasibuan, M. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Katrasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat : memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta: Cides.
- Kunarjo. (1996). *Perencanaan dan Pembiayaan pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Siagian, S. P. (2003). *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, B. (2006). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Widjaja, H. (2003). *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.